

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Republik Persatuan Myanmar (Birma/*Burma*) adalah sebuah negara di Asia Tenggara yang memiliki wilayah seluas 680 ribu km². Myanmar merupakan negara berkembang dan memiliki populasi lebih dari 50 juta jiwa yang mayoritas populasi berada di Ibu kota negara ini sebelumnya terletak di Yangon dan dipindahkan oleh pemerintahan junta militer ke Naypyidaw pada tanggal 7 November 2005.

Selama ini Myanmar dikenal sebagai negara yang pemerintahannya telah melakukan pelanggaran Hak Asasi Manusia paling berat diantara negara-negara di sekitar Asia Tenggara lainnya. Myanmar merupakan negara yang tidak punya pengalaman hidup demokratis seperti negara-negara tetangga, tetapi bukan berarti bahwa suatu saat tidak akan terbangun iklim demokratis di negara pimpinan militer tersebut.

Sejak Myanmar merdeka pada tahun 1948, berada di bawah pemerintahan sipil U Nu, ia mencoba menjalankan pemerintahan yang demokratis dengan menerapkan system parlementer. Sama halnya dengan Negara yang baru merdeka lainnya, pemerintahan U Nu juga dihadapkan pada keadaan sosio-politik yang rumit. Strategi yang dilakukan U Nu gagal mengatasi berbagai persoalan kompleks yang muncul, baik perekonomian, maupun pemberontakan. (Firman, 2010)

Pemerintahan junta militer di Myanmar bermula pada tahun 1962 saat jenderal Ne Win melakukan kudeta terhadap pemerintahan sipil perdana menteri U Nu (Wilson, *Dictatorship and Decline in Myanmar*, 2008). Setelah melakukan pemberontakan, jenderal Ne Win menggunakan kekuatan militer sebagai basis utama dari kekuatan pemerintahan Myanmar. Maka dapat dikatakan bahwa pemerintahan dibawah pimpinan jenderal Ne Win merupakan pemerintahan junta militer. Pemerintahan militer telah menguasai Myanmar pada saat itu dan sering terjadi pelanggaran hak asasi manusia. Dimana rakyat Myanmar mengalami tindakan-tindakan represi dari pemerintah militer, dengan membatasi ruang gerak mereka dalam berekspresi, mengemukakan pendapat, tidak diberikan kebebasan untuk memilih siapa yang berhak menjadi pemimpin.

Jenderal Ne Win memiliki pandangan bahwa untuk menghindari disintegrasi di Myanmar, maka dibutuhkan suatu bentuk kepemimpinan yang tegas, oleh karena itu kekuatan militer dianggap mampu mencegah terjadinya perpecahan diantara berbagai kelompok masyarakat yang akan mengganggu stabilitas negara. Namun dalam prakteknya, pemerintahan Junta Militer tidak mampu memberikan kesejahteraan bagi masyarakat Myanmar. Pemerintahan Junta Militer yang dipimpin oleh Jenderal Ne Win menyebabkan banyaknya pelanggaran HAM yang terjadi di Myanmar.

Pada tanggal 13 maret 1988, terjadi bentrok antara tentara dengan mahasiswa *Rangon Institute of Technology* (RIT), beberapa mahasiswa tewas. Bentrokan ini merupakan manifestasi kekecewaan rakyat atas perekonomian yang semakin buruk. Pada 18 maret, terjadi demonstrasi yang lebih besar di

kotaRanggon, lebih dari 40 orang tewas. Kondisi yang demikian ini mendorong rakyat miskin berani melakukan tuntutan agar Ne Win mundur sebagai perdana menteri. Karena merasa kewalahan menghadapi desakan untuk mundur, Ne Win kemudian menunjuk Jenderal Sei Lwin yang notabene adalah orang kepercayaan Ne Win didalam partai Lanzin sebagai perdana menteri menggantikan dirinya. Tepatnya pada bulan juli 1988, Sein Lwin digantikan oleh Dr. Maung Maung yang berasal dari sipil. Sebagai perdana menteri, Maung Maung kemudian melakukan perubahan-perubahan antara lain, mengizinkan berdirinya partai politik dan kebijakan multipartai, kesempatan bagi rakyat untuk berpartisipasi dalam politik dan menjalin kerjasama dengan berbagai kelompok politik. Akan tetapi, Maung Maung tetap mengukuhkan dan berpegang teguh pada system pemerintahan sosialis. Konsekuensinya adalah bahwa ia tetap saja mampu membawa perubahan-perubahan berarti terkait dengan instabilitas ekonomi politik.

Tidak adanya perubahan-perubahan mendasar inilah yang kemudian mendorong kelompok militer kembali melakukan kudeta militer dibawah pimpinan jenderal Saw Maung. Ia adalah seorang jenderal didikan Ne Win. Jenderal Saw Maung menggunakan cara-cara represif terhadap para oposan dan tidak memberikan ruang gerak bagi kaum oposisi atau lawan politiknya untuk mengkritik dan mengecamnya. Saw Maung sangat alergi terhadap kritik dan demonstrasi mahasiswa. Untuk menangani aksi protes dari rakyatnya, Saw Maung melakukan kudeta dan membentuk Dewan Restorasi penegakan hukum Negara (SLORC). Pada tahun 1989 SLORC mendeklarasikan hukum darurat militer untuk

menangani berbagai aksi protes yang semakin meluas. Pada mulanya, para pemimpin militer Myanmar menahan diri mereka dan membiarkan aksi protes terus berlanjut, tetapi setelah satu minggu kemudian ketika aksi terus berlanjut dan semakin besar, junta militer mulai mengambil tindakan. Ratusan tentara dan polisi anti huru hara digerakan untuk memadamkan aksi protes lebih lanjut sehingga kemudian aksi demo itu dibalas dengan gaya penumpasan ala militer yang brutal sehingga berakhir dengan tindakan kekerasan oleh tentara terhadap para demonstran. Dalam aksi tersebut setidaknya 3000 orang terbunuh.

Gerakan pro demokrasi datang dari berbagai macam kelompok yang menginginkan pemerintahan otoriter junta militer segera berakhir. *Pertama*, kelompok agamawan (sangha Buddha/biksu) yang dikenal dengan istilah *monastic order*. Semua orang percaya bahwa tentara tidak akan berani bertindak keras terhadap biksu, namun pada 20 oktober 1990 dibawah perintah jenderal Sauw Maung memerintahkan pembekuan semua organisasi Buddha yang berhubungan dengan gerakan pro demokrasi. Para komandan tentara di beri kekuasaan untuk menangkap, memenjarakan bahkan mengeksekusi para biksu yang melanggar peraturan pemerintah junta militer. *Kedua*, kelompok oposisi mahasiswa. Gerakan pemberontakan ini disokong oleh rakyat dan para biksu Buddha, namun ditindas dengan kekerasan oleh Jenderal Sauw Maung. Pembantaian ternyata tidak menyurutkan perlawanan rakyat Myanmar terhadap rezim militer. *Ketiga*, Liga Nasional Demokrasi yang dipimpin Aung San Suu Kyi menjadi sandaran para biksu Buddha. Gerakan massa yang pertama kali dipimpin oleh para biksu muda yang tidak memiliki ekspresi politik sendiri,

kemudian mencari kepemimpinan lewat Aung San Suu Kyi yang telah membangun otoritas moral untuk muncul sebagai “pemimpin” gerakan massa ini dari dalam tahanan rumah selama bertahun-tahun. Namun kenyataannya, Aung San Suu Kyi dan LND bukanlah pihak yang mengorganisir gerakan ini. Gerakan ini merupakan reaksi dari kesengsaraan rakyat.

Negara-negara ASEAN juga merasa prihatin terhadap situasi politik di Myanmar. Dan dengan ini mereka berharap agar pemerintah Myanmar segera melepaskan aktifis pro demokrasi dan sekaligus sebagai peraih nobel perdamaian Aung San Suu kyii dari dalam tahanan dan melanjutkan usaha dialog serta rekonsiliasi nasional. Dengan demikian diharapkan Myanmar yang selama ini terkesan menutupi diri untuk dapat menerima demokrasi dan kemudian dapat menerima demokrasi sebagaimana yang telah terjadi pada Negara-negara lain di kawasan Asia Tenggara. ASEAN tentunya berharap, krisis politik ini bisa segera diakhiri dengan jalan damai dan membawa Myanmar ke arah yang lebih baik. Perubahan sikap pemerintah junta militer untuk melakukan reformasi bagi Myanmar adalah jawaban untuk menjauhkan negara ini dalam krisis yang lebih besar.

ASEAN menerapkan kebijakan pendekatan konstruktif, kebijakan yang telah di terapkan ASEAN terhadap Negara Myanmar masih merupakan pendekatan terbaik. Untuk itulah ASEAN menganggap perlu dilakukan dukungan terhadap Myanmar dalam mewujudkan demokratisasi. Selain itu diharapkan Myanmar dapat bersikap lebih akomodatif dan mulai melakukan perbaikan-perbaikan diberbagai bidang tanpa terasa di sudutkan. (Herjono, 2010)

B. RUMUSAN MASALAH

Dari latar belakang masalah yang disebutkan, penulis akan menganalisa Mengapa Gerakan Pro Demokrasidi Myanmar Semakin Kuat ?. Hal ini menjadi perhatian peneliti untuk dianalisa lebih dalam.

C. TUJUAN PENELITIAN

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui lebih lanjut mengapa Gerakan Pro Demokrasi di Myanmar semakin kuat
2. Menjelaskan bagaimana dukungan masyarakat dan dukungan internasional terhadap gerakan pro demokrasi dalam mewujudkan Negara demokrasi

D. KERANGKA BERFIKIR

1. Teori Konstruktivisme

Dalam disiplin ilmu hubungan internasional, konstruktivisme mengklaim bahwa aspek penting dari hubungan internasional secara historis dan sosial kontingen, daripada konsekuensi tak terelakkan dari sifat manusia atau karakteristik penting lainnya politik dunia. Konstruktivisme memandang bahwa struktur internasional layaknya struktur sosial lain yang di pengaruhi oleh faktor ideasional yang terdiri dari norma, peraturan dan hukum tertentu (Soetjipto, 2015).

Menurut Martha Finnemore dan Sikkink, Norma Domestik sangat terjalin dengan cara kerja norma-norma internasional. Norma Internasional di mulai dari Norma Domestik dan menjadi skala internasional melalui berbagai macam upaya. Norma domestik dapat menjadi norma internasional karena adanya upaya dari norm entrepreneur yang mendorong evolusinya. Dan norma domestik ada, karena adanya norma internasional (Soetjipto, 2015).

Myanmar merupakan salah satu negara yang termasuk negara yang melakukan pelanggaran hak asasi manusia. Norma internasional yang mempengaruhi adanya tindakan norma domestik yaitu bahwa hak asasi manusia merupakan hak setiap individu yang harus dihargai termasuk setiap negara sehingga negara-negara yang menganut system demokrasi. Tuntutan dan dukungan yang diberikan merupakan bentuk dari reaksi internasional sehingga mengakibatkan gerakan pro demokrasi yang ada di Myanmar semakin kuat. Adanya tekanan dan dukungan yang dilakukan oleh negara-negara yang menginginkan Myanmar menjadi negara demokrasi, memaksa pemerintah Myanmar harus melakukan perubahan menuju negara demokrasi.

2. Teori Sistem Politik

Berdasarkan permasalahan di atas, penulis mencoba mendeskripsikan dengan menggunakan teori yang dikemukakan oleh David Easton, yaitu Analisa Sistem Politik (Mochtar Mas'oeid, 2001). Menurut David Easton, terdapat beberapa konsep yang dapat disusun secara sistematis sehingga akan memberi penjelasan singkat tentang cara kerja sistem politik. Konsep-konsep tersebut

adalah konsep input, konsep tuntutan, konsep dukungan, konsep konversi, konsep output, konsep ganjaran, konsep hukuman, serta konsep umpan balik.

David Easton adalah teoritis yang memperkenalkan system dalam ilmu politik. Menurut pendekatan ini, setiap sistem tentu bersifat : terdiri dari banyak bagian, bagian-bagian tersebut saling berinteraksi dan saling bergantung, dan system tersebut juga mempunyai batasan yang memisahkan dari lingkungan yang juga terdiri dari sistem-sistem lainnya

- a. Input merupakan masukan dari masyarakat ke dalam system politik. Input yang merupakan masukan dari masyarakat berupa tuntutan dan dukungan. Tuntutan secara sederhana dapat disebut sebagai perangkat kepentingan yang di alokasinya belum merata atas sejumlah unit masyarakat dalam system politik. Dukungan secara sederhana adalah upaya masyarakat untuk mendukung keberadaan system politik agar terus berjalan.
- b. Output adalah hasil kerja system politik yang berasal baik dari tuntutan maupun dukungan masyarakat. Output terbagi dua yaitu keputusan dan tindakan yang biasanya dilakukan oleh pemerintah. Keputusan adalah pemilihan satu atau beberapa pilihan tindakan sesuai tuntutan atau dukungan yang masuk. Sementara itu, tindakan adalah implementasi konkrit pemerintah atas keputusan yang dibuat.

Untuk dapat memahami lebih lanjut, berikut ini merupakan skema dari sistem politik yang dimaksud sebagai berikut :

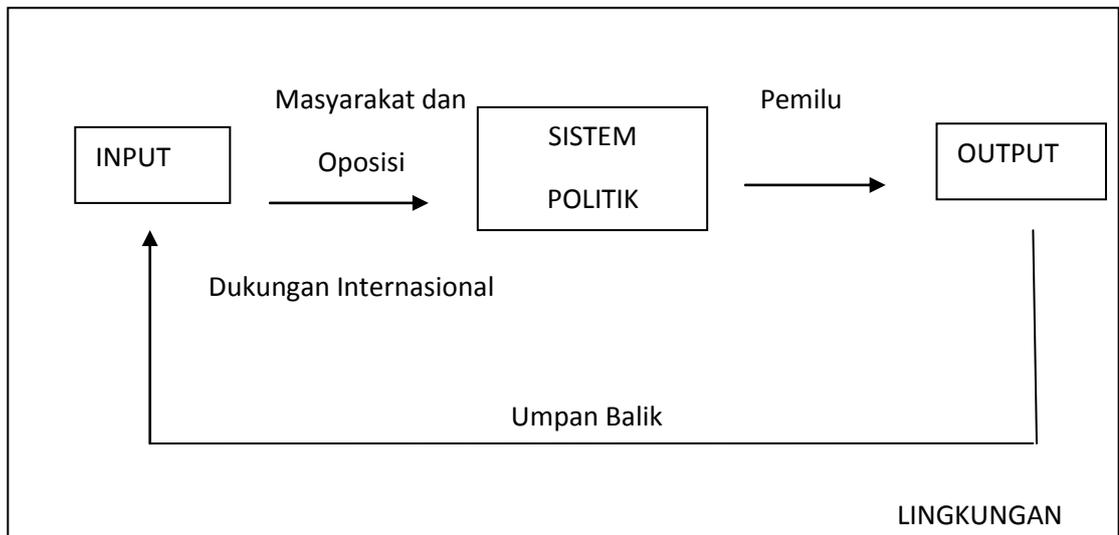
Gambar 1.1



Sumber : Mochtar Mas'ood dan Colin MacAndrews, *Perbandingan Sistem Politik*, Gajah Mada University

Berdasarkan teori di atas, maka implementasinya sebagai berikut :

Gambar 1.2



Input yang dimaksud ialah terdiri dari tuntutan dan dukungan yang dilakukan oleh masyarakat Myanmar yang merasa bahwa pemerintahan

junta militer Myanmar tidak berpihak kepada masyarakat sehingga tidak ada kesejahteraan dan kebebasan. Dari tuntutan dan dukungan tersebut yang memicu para tokoh oposisi dan gerakan pro demokrasi merasa kuat untuk menyuarakan demokrasi yang lebih baik lagi agar Negara Myanmar bisa menjadi salah satu Negara yang menjunjung tinggi nilai demokrasi.

Output: Dari tuntutan dan dukungan yang datang dari masyarakat domestik dan internasional, sehingga pemerintah mengubah Kebijakan yang bisa membawa Myanmar menuju negara yng demokratis.

E. HIPOTESA

Gerakan Pro Demokrasi di Myanmar semakin kuat karena adanya tekanan internasional dan domestik.

F. METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode kualitatif yaitu metode yang mengutamakan data yang berupa pernyataan, statement yang bersifat kualitatif, bukan kuantitas untuk dijadikan variable pemahaman. Teknik analisisnya secara deskripsi eksplanatoris yaitu menjelaskan dengan menggambarkan suatu fenomena dengan fakta-fakta yang aktual. Kemudian memberikan penjelasan obyektif menurut fakta dan data yang tersedia, menghubungkan antar factor sebagai unit analisis, dan menginterpretasikannya untuk mencapai kesimpulan. Teknik pengumpulan data sekunder melalui studi pustaka (*Library Research*) dengan bahan pustaka seperti buku, jurnal, bulletin,

surat kabar, serta media internet untuk memperoleh data yang lengkap, akurat, dan relevan.

G. SISTEMATIKA PENULISAN

Adapun sistematika dalam penulisan skripsi yang dilakukan oleh peneliti adalah sebagai berikut:

Bab I Merupakan bab pendahuluan yang terdiri dari : Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kerangka Berfikir, Hipotesa, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan

Bab II Membahas tentang Dinamika Politik di Myanmar

Bab III Membahas Tentang Kemunculan Gerakan Pro Demokrasi di Myanmar

Bab IV Membahas Tentang Perkembangan Gerakan Pro Demokrasi di Myanmar Yang Semakin Kuat. Meliputi, Dukungan Masyarakat dan Dukungan Internasional

Bab V Membahas Tentang Kesimpulan